

ABSTRAK

Keselamatan pejalan kaki merupakan bagian dari hak masyarakat yang harus dilindungi melalui penyediaan fasilitas pejalan kaki yang memadai. Jalan Raya Telang sebagai akses utama menuju Universitas Trunodjoyo Madura setiap hari dilalui oleh mahasiswa, namun kondisi trotoar di kawasan tersebut masih belum memenuhi standar keamanan karena mengalami kerusakan, tidak berkesinambungan, serta dialihfungsikan sebagai tempat berjualan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut terhadap penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki serta menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan trotoar oleh Pedagang Kaki Lima.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan mahasiswa Universitas Trunodjoyo Madura, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan, Kepala Desa Telang, serta Wakil Rektor III Universitas Trunodjoyo Madura. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum dan Teori Penegakan Hukum sebagai dasar analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 terhadap penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki di Jalan Raya Telang belum terlaksana secara optimal. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya trotoar yang rusak, tidak berkesinambungan, serta dialihfungsikan sebagai tempat berjualan oleh PKL sehingga mengurangi kenyamanan dan keselamatan mahasiswa sebagai pejalan kaki. Penegakan hukum oleh Satpol PP juga belum berjalan efektif karena masih mengutamakan pendekatan persuasif, belum menerapkan sanksi secara konsisten, serta menghadapi kendala berupa keterbatasan personel, koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemeliharaan trotoar, koordinasi antarinstansi, serta penegakan hukum yang lebih tegas agar fungsi trotoar sebagai fasilitas pejalan kaki dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Jalur Pejalan Kaki, Keselamatan Mahasiswa, Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima.

ABSTRACT

Pedestrian safety is part of the public's rights that must be protected through the provision of adequate pedestrian facilities. Jalan Raya Telang, as the main access road to Universitas Trunodjoyo Madura, is used daily by students. However, the sidewalks along this road do not meet safety standards because they are damaged, discontinuous, and frequently occupied by street vendors. These conditions indicate that the implementation of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Public Order and Public Peace has not been carried out optimally. This study aims to analyze the implementation of the regional regulation regarding the provision and maintenance of pedestrian facilities and to examine the effectiveness of law enforcement against the misuse of sidewalks by street vendors.

This study employed an empirical legal research method using statutory and sociological approaches. Primary data were collected through interviews with students of Universitas Trunodjoyo Madura, street vendors, officers of the Bangkalan Regency Civil Service Police Unit (Satpol PP), the Public Works and Spatial Planning Office of Bangkalan Regency, the Head of Telang Village, and the Vice Rector III of Universitas Trunodjoyo Madura. Secondary data were obtained through literature studies involving legislation, books, scientific journals, and other supporting documents. The collected data were analyzed descriptively and qualitatively using the Theory of Legal Certainty and the Theory of Law Enforcement.

The findings reveal that the implementation of Bangkalan Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 regarding the provision and maintenance of pedestrian facilities on Jalan Raya Telang has not been optimal. This is indicated by damaged and discontinuous sidewalks, as well as the misuse of sidewalks by street vendors, which reduces the safety and comfort of students as pedestrians. Furthermore, law enforcement by the Civil Service Police Unit has not been effective because it primarily relies on persuasive measures without consistent sanctions. It also faces obstacles such as limited personnel, insufficient inter-agency coordination, and low public legal awareness. Therefore, improvements in sidewalk maintenance, stronger coordination among relevant agencies, and firmer law enforcement are necessary to ensure that sidewalks function properly as pedestrian facilities.

Keywords: *Pedestrian Facilities, Student Safety, Law Enforcement, Regional Regulation, Street Vendors.*